

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Capaian Kinerja: Studi Kasus Berbasis Dokumen LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022–2024

Padriyansyah^{1*}, Trie Sartika Pratiwi²
Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Sumatera Selatan

¹*Email:* padriyansyah@unsri.ac.id,

²*Email :* trie.sartika@fe.unsri.ac.id

ABSTRAK

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SAKIP dan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2022–2024. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif evaluatif dengan desain studi pada satu instansi. Data penelitian bersumber dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022–2024 yang diperoleh melalui website resmi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis dokumen dengan menelaah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja, serta capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dan didukung oleh perencanaan serta pelaporan kinerja yang tersusun secara sistematis. Capaian kinerja berdasarkan IKU dan IKK selama periode penelitian secara umum berada pada kategori tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, capaian kinerja relatif lebih stabil dan merata dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan perlunya penguatan pada aspek evaluasi kinerja yang berorientasi pada outcome agar capaian kinerja tidak hanya berfokus pada output kegiatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SAKIP berkontribusi positif terhadap capaian kinerja instansi, namun masih memerlukan penguatan berkelanjutan terutama pada aspek evaluasi kinerja berbasis hasil.

Katakunci: SAKIP; evaluasi kinerja; capaian kinerja; LKjIP; pemerintah daerah

ABSTRACT

The implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) is a key instrument for achieving accountability and improving the performance of government agencies. This study aims to evaluate the implementation of SAKIP and the

performance achievements of the South Sumatra Provincial Cooperatives and SMEs Office during the 2022–2024 period. The study employed a descriptive evaluative approach with a single-agency study design. Data were sourced from the 2022–2024 Government Agency Performance Report (LKjIP) obtained from the official website of the South Sumatra Provincial Cooperatives and SMEs Office. Data analysis was conducted through document analysis, examining performance planning, performance measurement, performance reporting, and performance evaluation, as well as the achievement of Key Performance Indicators (KPI) and Activity Performance Indicators (IKK).

The results indicate that SAKIP implementation has been carried out in accordance with the established stages and is supported by systematic planning and performance reporting. Performance achievements based on KPI and IKK during the study period were generally in the high category and showed an increasing trend from year to year. In 2024, performance achievements were relatively more stable and equitable compared to the previous year. However, evaluation results indicate the need to strengthen outcome-oriented performance evaluation aspects so that performance achievements do not solely focus on activity outputs. This study concludes that the implementation of SAKIP has contributed positively to agency performance achievements, but still requires continued strengthening, particularly in the aspect of results-based performance evaluation.

Keywords: SAKIP; performance evaluation; performance achievements; LKjIP; local government

A. PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan modern yang menuntut setiap instansi pemerintah untuk mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara transparan dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks pengelolaan keuangan dan kinerja sektor publik, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dengan kemampuan instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, Renyowijoyo dan Prabowo (2020)

menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja menjadi instrumen utama dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengukuran capaian kinerja yang terukur dan dapat dievaluasi.

Di Indonesia, upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diwujudkan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP dirancang sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Penerapan SAKIP bertujuan untuk mendorong terciptanya pengelolaan kinerja berbasis hasil (result-

based management) dan memastikan bahwa penggunaan anggaran negara memberikan manfaat optimal bagi masyarakat (LAN, 2015). Penelitian Sari dan Putra (2019) menunjukkan bahwa implementasi SAKIP yang konsisten mampu meningkatkan kejelasan sasaran strategis dan keterkaitan antara perencanaan dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Implementasi SAKIP menjadi semakin penting dalam konteks desentralisasi pemerintahan daerah, di mana pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola kinerja dan anggaran secara efektif dan akuntabel. Dinas Koperasi dan UKM sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan sektor penting dalam perekonomian daerah. Penelitian Wahyuni dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa kualitas implementasi SAKIP pada perangkat daerah berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan sektor ekonomi daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrumen utama dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam kerangka SAKIP. LKjIP memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, LKjIP dapat digunakan sebagai sumber data yang relevan untuk mengevaluasi

implementasi SAKIP dan capaian kinerja instansi pemerintah secara objektif dan terdokumentasi (Bastian, 2014). Penelitian Yuliani (2014) menegaskan bahwa dokumen kinerja pemerintah daerah, termasuk LKjIP, dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi kinerja yang andal apabila disusun secara konsisten dan berbasis indikator kinerja.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SAKIP berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa implementasi SAKIP yang efektif dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja sektor publik. Selain itu, Wardani dan Dewi (2022) menemukan bahwa kualitas implementasi SAKIP berpengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Namun demikian, beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa implementasi SAKIP di sejumlah daerah masih cenderung berorientasi administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan evaluasi kinerja berbasis outcome (Setiawan & Kurniawan, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada evaluasi implementasi SAKIP dan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sumber data utama untuk menilai keselarasan antara perencanaan kinerja, pelaksanaan program, pelaporan kinerja, dan capaian indikator kinerja. Dengan menggunakan

pendekatan evaluatif berbasis dokumen resmi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian akuntabilitas kinerja sektor publik serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dan pengelolaan kinerja berbasis hasil.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif evaluatif dengan desain studi pada satu instansi, yaitu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan deskriptif evaluatif digunakan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan capaian kinerja instansi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Desain studi pada satu instansi dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai pelaksanaan SAKIP dalam satu unit organisasi pemerintah daerah.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data dokumen resmi yang diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022–2024. Dokumen LKjIP tersebut diunduh dari website resmi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada

alamat

<https://diskopukm.sumselprov.go.id/page/ppid>.

Penggunaan dokumen LKjIP sebagai sumber data didasarkan pada pertimbangan bahwa LKjIP merupakan dokumen formal pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang disusun berdasarkan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan digunakan secara resmi dalam proses evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen (document analysis). Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah secara sistematis isi dokumen LKjIP untuk mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan implementasi SAKIP dan capaian kinerja instansi. Tahapan analisis data meliputi:

1. Identifikasi komponen SAKIP, yang mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen LKjIP.
2. Analisis capaian kinerja, dengan membandingkan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang disajikan dalam LKjIP.
3. Evaluasi keterkaitan antara implementasi SAKIP dan capaian kinerja, dengan menelaah konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

kinerja yang tercermin dalam dokumen LKjIP.

4. Penyajian hasil analisis dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel untuk menggambarkan tingkat implementasi SAKIP dan capaian kinerja instansi secara sistematis.

Keabsahan Data dan Teknik Validasi

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik validasi sumber data, yaitu dengan menggunakan dokumen LKjIP yang diterbitkan secara resmi oleh instansi yang bersangkutan dan dipublikasikan melalui website resmi pemerintah daerah. Selain itu, konsistensi data antar tahun (2022–2024) digunakan sebagai dasar untuk menilai keandalan informasi yang dianalisis.

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan pada penggunaan data sekunder berupa dokumen LKjIP tanpa melibatkan data primer seperti wawancara atau observasi langsung. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menggambarkan evaluasi implementasi SAKIP dan capaian kinerja berdasarkan informasi yang terdokumentasi dalam laporan resmi instansi. Meskipun demikian, penggunaan dokumen LKjIP dinilai relevan dan memadai untuk mencapai tujuan penelitian, mengingat LKjIP merupakan instrumen utama pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelaahan terhadap dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022–2024 menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja. Keempat tahapan tersebut disusun secara sistematis dan terdokumentasi dalam dokumen LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi.

Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan tujuan strategis, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama (IKU) yang mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. Dokumen LKjIP Tahun 2022 menunjukkan bahwa perencanaan kinerja telah diselaraskan dengan rencana strategis perangkat daerah dan dituangkan dalam penetapan kinerja tahunan (LKjIP 2022, hal. 10–13). Pola perencanaan ini dipertahankan pada Tahun 2023 dan 2024 dengan penyesuaian target kinerja sesuai prioritas pembangunan daerah (LKjIP 2023, hal. 11–14; LKjIP 2024, hal. 12–15).

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan LKjIP Tahun 2022, pengukuran kinerja dilakukan secara periodik terhadap indikator kinerja program dan kegiatan, dengan hasil pengukuran disajikan dalam bentuk persentase capaian kinerja (LKjIP 2022,

hal. 24–27). Mekanisme pengukuran kinerja yang sama juga diterapkan pada Tahun 2023 dan 2024, dengan penyajian capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan secara konsisten (LKjIP 2023, hal. 26–29; LKjIP 2024, hal. 27–30).

Pelaporan kinerja dituangkan dalam penyusunan LKjIP sebagai dokumen resmi pertanggungjawaban kinerja instansi. Dokumen LKjIP Tahun 2022–2024 memuat informasi mengenai realisasi kinerja, realisasi anggaran, serta capaian indikator kinerja yang disusun berdasarkan hasil pengukuran kinerja selama satu tahun anggaran (LKjIP 2022, hal. 1–5; LKjIP 2023, hal. 1–6; LKjIP 2024, hal. 1–6).

Evaluasi kinerja dilakukan dengan menganalisis tingkat pencapaian sasaran strategis dan mengidentifikasi faktor pendukung serta kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pada LKjIP Tahun 2024, hasil evaluasi kinerja disajikan lebih rinci dengan memuat analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program sebagai bagian dari penguatan implementasi SAKIP (LKjIP 2024, hal. 31–35).

Implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelaahan terhadap dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022–2024 menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja. Keempat tahapan tersebut disusun secara

sistematis dan terdokumentasi dalam dokumen LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi.

Pada aspek perencanaan kinerja, instansi telah menetapkan tujuan strategis, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama (IKU) yang mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. LKjIP Tahun 2022 menunjukkan bahwa perencanaan kinerja telah diselaraskan dengan rencana strategis perangkat daerah dan dituangkan dalam penetapan kinerja tahunan (LKjIP 2022, hal. 10–13). Pola perencanaan ini dipertahankan pada Tahun 2023 dan 2024 dengan penyesuaian target kinerja sesuai prioritas pembangunan daerah (LKjIP 2023, hal. 11–14; LKjIP 2024, hal. 12–15).

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja. Berdasarkan LKjIP Tahun 2022, pengukuran kinerja dilakukan secara periodik terhadap indikator kinerja program dan kegiatan, dengan hasil pengukuran disajikan dalam bentuk persentase capaian kinerja (LKjIP 2022, hal. 24–27). Mekanisme yang sama diterapkan pada Tahun 2023 dan 2024, dengan penyajian capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan secara konsisten (LKjIP 2023, hal. 26–29; LKjIP 2024, hal. 27–30).

Pelaporan kinerja dituangkan dalam penyusunan LKjIP sebagai dokumen resmi pertanggungjawaban kinerja instansi. Dokumen LKjIP Tahun 2022–2024 memuat informasi mengenai realisasi kinerja, realisasi anggaran, serta capaian indikator kinerja yang disusun

berdasarkan hasil pengukuran kinerja selama satu tahun anggaran (LKjIP 2022, hal. 1–5; LKjIP 2023, hal. 1–6; LKjIP 2024, hal. 1–6).

Evaluasi kinerja dilakukan dengan menganalisis tingkat pencapaian sasaran strategis serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala pelaksanaan program dan kegiatan. Pada LKjIP Tahun 2024, evaluasi kinerja disajikan lebih rinci dengan memuat analisis capaian kinerja serta efisiensi pelaksanaan program sebagai bagian dari penguatan implementasi SAKIP (LKjIP 2024, hal. 31–35).

Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Hasil analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan bahwa secara umum Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan mampu mencapai target kinerja yang telah

ditetapkan selama periode 2022–2024. Pada Tahun 2022, sebagian besar IKU mencapai kategori capaian tinggi dengan persentase capaian di atas 90 persen, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang realisasinya belum sepenuhnya mencapai target (LKjIP 2022, hal. 24–26).

Pada Tahun 2023, capaian IKU menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar indikator telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan (LKjIP 2023, hal. 26–28). Pada Tahun 2024, capaian IKU menunjukkan hasil yang relatif lebih stabil dan merata, di mana hampir seluruh indikator mencapai atau melampaui target kinerja yang telah ditetapkan (LKjIP 2024, hal. 27–30).

Tabel 1. Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022–2024

| Tahun | Jumlah IKU | IKU Tercapai (%) | Kategori Capaian | Sumber Dokumen |
|-------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2022 | IKU Perangkat Daerah | >90% | Tinggi | LKjIP 2022, hal. 24–26 |
| 2023 | IKU Perangkat Daerah | >90% | Tinggi | LKjIP 2023, hal. 26–28 |
| 2024 | IKU Perangkat Daerah | >95% | Sangat Tinggi | LKjIP 2024, hal. 27–30 |

Berdasarkan Tabel 1, capaian IKU selama periode penelitian secara umum berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Pada Tahun 2022 dan 2023, persentase capaian IKU tercatat di atas 90 persen, sementara pada Tahun 2024

meningkat menjadi di atas 95 persen. Pola ini menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja antar tahun sebagaimana tercermin dalam dokumen LKjIP

Tabel 2. Capaian IKU Tahun 2022

| Sasaran Strategis | IKU | Target (%) | Realisasi (%) | Tingkat Capaian | Sumber |
|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Daya saing UMKM | UMKM binaan naik kelas | 90 | 88 | Tinggi | LKjIP 2022, hal. 24 |
| Kualitas koperasi | Persentase koperasi aktif | 95 | 93 | Tinggi | LKjIP 2022, hal. 25 |
| Akses pembiayaan UMKM | UMKM akses pembiayaan | 85 | 82 | Cukup Tinggi | LKjIP 2022, hal. 26 |

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 sebagian besar indikator kinerja utama belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, meskipun tingkat capaian secara umum berada pada kategori tinggi. Indikator daya saing UMKM dan kualitas koperasi menunjukkan realisasi yang mendekati

target, sedangkan indikator akses pembiayaan UMKM memiliki tingkat capaian yang relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Hal ini mencerminkan adanya variasi capaian kinerja antar sasaran strategis pada Tahun 2022.

Tabel 3. Capaian IKU Tahun 2023

| Sasaran Strategis | IKU | Target (%) | Realisasi (%) | Tingkat Capaian | Sumber |
|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Daya saing UMKM | UMKM binaan naik kelas | 90 | 91 | Tinggi | LKjIP 2023, hal. 26 |
| Kualitas koperasi | Persentase koperasi aktif | 95 | 94 | Tinggi | LKjIP 2023, hal. 27 |
| Akses pembiayaan UMKM | UMKM akses pembiayaan | 85 | 86 | Tinggi | LKjIP 2023, hal. 28 |

Berdasarkan Tabel 3, capaian IKU pada Tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2022. Seluruh indikator berada pada kategori tinggi, dan sebagian indikator telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan

adanya perbaikan capaian kinerja pada sebagian besar sasaran strategis instansi selama Tahun 2023.

Tabel 4. Capaian IKU Tahun 2024

| Tahun | Program/Kegiatan | IKK | Target | Realisasi | Capaian (%) | Sumber |
|-------|------------------|--------------------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 2022 | Pembinaan UMKM | Jumlah UMKM dibina | 500 | 470 | 94,0 | LKjIP 2022, hal. 30 |
| 2023 | Pembinaan UMKM | Jumlah UMKM dibina | 550 | 560 | 101,8 | LKjIP 2023, hal. 31 |
| 2024 | Pembinaan UMKM | Jumlah UMKM dibina | 600 | 620 | 103,3 | LKjIP 2024, hal. 32 |

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 hampir seluruh indikator kinerja utama mencapai kategori sangat tinggi. Realisasi capaian kinerja pada setiap indikator telah melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat capaian yang relatif merata antar sasaran strategis. Hasil ini mencerminkan stabilisasi capaian kinerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Selain IKU, capaian kinerja dianalisis berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mencerminkan kinerja operasional pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2022–2024

| Tahun | Program/Kegiatan | IKK | Target | Realisasi | Capaian (%) | Sumber |
|-------|------------------|--------------------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 2022 | Pembinaan UMKM | Jumlah UMKM dibina | 500 | 470 | 94,0 | LKjIP 2022, hal. 30 |
| 2023 | Pembinaan UMKM | Jumlah UMKM dibina | 550 | 560 | 101,8 | LKjIP 2023, hal. 31 |
| 2024 | Pembinaan UMKM | Jumlah UMKM dibina | 600 | 620 | 103,3 | LKjIP 2024, hal. 32 |

Berdasarkan Tabel 5, capaian IKK menunjukkan tren peningkatan dari Tahun 2022 hingga 2024. Pada Tahun 2022, realisasi kegiatan pembinaan UMKM mendekati target yang ditetapkan, sedangkan pada Tahun 2023 dan 2024 realisasi kegiatan telah

melampaui target. Peningkatan capaian ini menunjukkan perbaikan kinerja operasional kegiatan dari tahun ke tahun.

Ringkasan Capaian Kinerja IKU dan IKK

Tabel 6. Ringkasan Capaian Kinerja IKU dan IKK Tahun 2022–2024

| Tahun | Rata-rata IKU (%) | Rata-rata IKK (%) | Kategori Kinerja | Sumber |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 2022 | >90 | 94,0 | Tinggi | LKjIP 2022 |
| 2023 | >92 | >100 | Tinggi | LKjIP 2023 |
| 2024 | >95 | >100 | Sangat Tinggi | LKjIP 2024 |

Tabel 6 menunjukkan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja berdasarkan IKU dan IKK mengalami peningkatan selama periode penelitian. Pada Tahun 2024, rata-rata capaian kinerja berada pada kategori sangat tinggi baik untuk indikator strategis maupun indikator kegiatan. Ringkasan ini memberikan gambaran umum mengenai

perkembangan capaian kinerja instansi selama periode 2022–2024.

Pembahasan

Evaluasi Implementasi SAKIP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2022–2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam regulasi SAKIP, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja. Keempat tahapan tersebut tersaji secara sistematis dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang mencerminkan adanya upaya instansi dalam memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja.

Pada aspek perencanaan kinerja, keselarasan antara tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama (IKU) menunjukkan bahwa perencanaan kinerja telah disusun secara terstruktur. Hal ini sejalan dengan pandangan Mahmudi (2016) yang menyatakan bahwa perencanaan kinerja merupakan fondasi utama dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun demikian, variasi capaian kinerja pada beberapa indikator pada Tahun 2022 mengindikasikan bahwa perencanaan kinerja masih memerlukan penguatan dalam penetapan target yang lebih realistis dan terukur.

Pada aspek pengukuran dan pelaporan kinerja, konsistensi penyajian target dan realisasi kinerja dalam dokumen LKjIP menunjukkan bahwa mekanisme pengukuran kinerja telah berjalan secara formal dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pedoman evaluasi SAKIP yang menekankan pentingnya pengukuran kinerja berbasis indikator yang jelas dan dapat diukur (LAN, 2015). Penyajian capaian kinerja dalam bentuk persentase capaian juga memudahkan proses evaluasi kinerja tahunan.

Evaluasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan kualitas implementasi SAKIP, ditandai dengan analisis capaian kinerja yang lebih rinci serta identifikasi faktor pendukung dan kendala pelaksanaan program. Kondisi ini mengindikasikan adanya proses pembelajaran organisasi dalam implementasi SAKIP, di mana hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan IKU dan IKK

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2022–2024 menunjukkan tren peningkatan kinerja yang relatif konsisten. Pada Tahun 2022, meskipun sebagian besar IKU mencapai kategori capaian tinggi, masih terdapat beberapa indikator yang realisasinya belum sepenuhnya mencapai target. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada tahap awal masih menghadapi tantangan dalam pencapaian sasaran strategis secara optimal.

Peningkatan capaian IKU pada Tahun 2023 dan stabilisasi capaian pada Tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini sejalan dengan konsep manajemen kinerja sektor publik yang menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja untuk mencapai hasil yang optimal (Mardiasmo, 2018). Pencapaian IKU yang relatif merata pada

Tahun 2024 mencerminkan peningkatan efektivitas pengelolaan kinerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Selain IKU, capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) menunjukkan bahwa kinerja operasional kegiatan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian IKK yang melampaui target pada Tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis instansi. Namun demikian, capaian IKK yang tinggi perlu diimbangi dengan evaluasi terhadap kontribusi kegiatan tersebut terhadap pencapaian outcome, agar tidak hanya berorientasi pada output kegiatan semata.

Implikasi Evaluasi Implementasi SAKIP terhadap Kinerja Instansi

Hasil evaluasi implementasi SAKIP dan capaian kinerja menunjukkan bahwa penerapan SAKIP berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Keterpaduan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja memungkinkan instansi untuk memantau pencapaian sasaran strategis secara lebih sistematis.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan perlunya penguatan pada aspek evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Evaluasi kinerja yang lebih mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa capaian kinerja yang tinggi benar-benar mencerminkan peningkatan manfaat bagi

masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan pandangan Bastian (2014) yang menekankan bahwa akuntabilitas kinerja tidak hanya diukur dari pencapaian indikator, tetapi juga dari dampak nyata pelaksanaan program pemerintah.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan kemajuan yang positif, namun masih memerlukan penguatan berkelanjutan terutama pada aspek evaluasi kinerja berbasis outcome. Temuan ini menjadi dasar penting bagi perumusan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan pada bagian selanjutnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Keselarasan antara tujuan strategis, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang disajikan dalam dokumen LKjIP menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas kinerja telah berjalan secara formal dan terstruktur. Capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selama periode penelitian secara umum berada pada kategori tinggi dan menunjukkan

tren peningkatan dari tahun ke tahun, dengan stabilisasi capaian kinerja yang lebih merata pada Tahun 2024.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi SAKIP masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek evaluasi kinerja yang berorientasi pada outcome. Evaluasi kinerja yang lebih mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa capaian indikator kinerja tidak hanya mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan sektor koperasi dan UKM. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan peningkatan kualitas implementasi SAKIP sangat bergantung pada penguatan evaluasi kinerja berbasis hasil sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja instansi pemerintah daerah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2014). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2015). *Pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)*. Jakarta: KemenPAN-RB.
- LAN Republik Indonesia. (2015). *Pedoman penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi ketiga). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Renyowijoyo, M., & Prabowo, A. (2020). Pengaruh penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 85–98.
- Sari, D. P., & Putra, R. E. (2019). Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. *Jurnal Akuntansi Publik*, 7(1), 45–58.
- Setiawan, A., & Kurniawan, D. (2020). Evaluasi penerapan SAKIP pada pemerintah daerah: Pendekatan kinerja berbasis hasil. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 112–124.
- Wardani, R. S., & Dewi, N. K. (2022). Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja. *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan*, 14(1), 23–37.
- Wahyuni, S., & Nugroho, P. (2021). Implementasi SAKIP dan implikasinya terhadap kinerja perangkat daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(3), 201–215.
- Yuliani, S. (2014). Pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 456–470.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. (2023). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2022*. Palembang: Dinas Koperasi

dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.
Diakses dari
<https://diskopukm.sumselprov.go.id/page/ppid>

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. (2024). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2023*. Palembang: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Diakses dari
<https://diskopukm.sumselprov.go.id/page/ppid>

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. (2025). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2024*. Palembang: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Diakses dari
<https://diskopukm.sumselprov.go.id/page/ppid>